



Dampak Keluarnya NU dari Masyumi Terhadap Politik Indonesia, 1952-1960

***Martin Rizaldi**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Email: martin.rizaldi.1907316@students.um.ac.id

Berliana Fatihatuz Fiizha

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Email: berliana.fatihatus.1907316@students.um.ac.id

Ervin Yunus Evendi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Email: ervin.yunus.1907316@students.um.ac.id

Muhammad 'Afwan Mufti

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
email: muhammad.afwan.1907316@students.um.ac.id

Shovi Wiranata Febriani

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
email: shovi.wiranata.1907316@students.um.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 31-12-2022, Revised: 21-03-2023, Accepted: 27-03-2023, Published: 30-06-2023

Abstrak

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia dengan mengutamakan dua realitas penting yaitu ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. NU berperan dalam dunia politik, khususnya dalam sebuah majelis Islam yaitu MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) pada tahun 1937. Namun, majelis tersebut diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943. Masyumi memiliki visi menjadi partai politik dan bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi Islam lainnya. Pembahasan akan dijelaskan secara spesifik mengenai keterkaitan antara NU dan Masyumi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peranan NU dalam Masyumi, penyebab keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952, dan dampak terhadap politik mengenai keluarnya NU dari Masyumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan keluarnya NU semakin parah karena perbedaan pemahaman antara kultural dan ideologis dalam tubuh Masyumi. Keluarnya NU dari Masyumi memberikan dampak politik tersendiri bagi Indonesia. NU yang akhirnya menjadi sebuah partai politik baru dengan sepak terjang cukup baik dalam pemilu tahun 1955, hingga dilarang beroperasinya organisasi Masyumi di berbagai daerah dan terjadinya pemberontakan PRRI.

Kata Kunci:

Masyumi; Nahdlatul Ulama; politik

Abstract

Nahdlatul Ulama is one of the Islamic organizations in Indonesia that prioritizes two important realities, namely Islam and Indonesia. NU played a role in the world of politics, especially in an Islamic assembly, namely MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) in 1937. However, the assembly was changed to Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) in 1943. Masyumi had a vision of becoming a political party and working together with NU, Muhammadiyah, Persis, and other Islamic organizations. The discussion will be focused specifically explain the relationship between NU and Masyumi. The aim is to explain the role of NU in Masyumi, the causes of NU's departure from Masyumi in 1952, and the political impact of NU's departure from Masyumi. The research method that will be used in this paper is historical research methods with a qualitative approach. The results of the study explained that the reason for leaving NU was getting worse because of differences in understanding between culture and ideology within Masyumi. NU's exit from Masyumi had its own political impact on Indonesia. NU which eventually became a new political party with quite good behavior in the 1955 elections, until the Masyumi organization was banned from operating in various regions and the PRRI rebellion occurred.

Keywords:

Masyumi; Nahdlatul Ulama; politics



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan NU merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri lahir awalnya tidak lepas dari faktor-faktor seperti realitas ke-Islaman serta realitas ke-Indonesiaan. Realitas ke-Islaman Nahdlatul Ulama lahir menjadi wadah berkumpulnya ulama-ulama untuk memperjuangkan tradisi pemahaman maupun pengalaman mengenai Islam sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Nahdlatul Ulama saat itu tidak menginginkan adanya pembaharuan, dan menurut Geertz dalam Mundlir & Alrianingrum (2014) sendiri juga mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan golongan anti modernisme dan organisasi yang menentang akan pembaharuan. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah benar sebab sebetulnya Nahdlatul Ulama lebih modern daripada golongan modernisme. Nurcholish Madjid yakni seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia mengemukakan bahwasannya pola pemikiran Neo-modernisme Islam banyak muncul dari kalangan Nahdlatul Ulama yang kaya akan khazanah klasik, dan terbukti dengan munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimana tokoh-tokohnya tersebut didominasi oleh kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (Makhmudah, 2015). Pemikiran Nahdlatul Ulama telah menembus batasan tradisi yang dianggap suci, bahkan tidak dapat diganggu gugat. Nahdlatul Ulama lebih banyak mengilhami mengenai pemikiran secara umum yang mengutamakan kepentingan umat manusia modern.

Berdasarkan historis, Nahdlatul Ulama menjalani berbagai aktivitas organisasi seperti dalam keikutsertaannya di masa Demokrasi Liberal, Terpimpin, hingga berubah menjadi partai politik. Pada tahun 1971, Nahdlatul Ulama berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lalu menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. Bergabungnya ulama di dalam Nahdlatul Ulama itulah yang sebelum kelahirannya

dikenal sebagai golongan atau kaum tradisional yang berasal dari kalangan pesantren. Kaum-kaum tradisional yang berasal dari kalangan pesantren tersebut menjalankan praktik-praktik keagamaan yang diwarisi dari para Walisongo. Hal itu banyak dilakukan di daerah pedesaan melalui pengajian, pengajaran kitab kuning, serta pelestarian tradisi Islamisasi lokal yang telah membudaya. Pesantren itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat berbasis agama. Nahdlatul Ulama memulai perjalanan langkahnya yang mengarah dalam berperan di dunia politik. Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam dunia politik yaitu setelah aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Akan tetapi, MIAI tidak berlaku lama dikarenakan membubarkan diri pada Oktober 1943, kemudian berganti menjadi Masyumi. Pada awalnya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) adalah organisasi non politik, namun pasca merdeka organisasi tersebut mengubah visi perjuangannya menjadi partai politik yang bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam lain sebagai upaya mendukung perjuangan Masyumi (Mundlir & Alrianingrum, 2014).

Sekitar tahun 1940-1950, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menjadi partai politik yang besar di Indonesia. Masyumi adalah partai yang anggotanya beraneka ragam, sehingga sering banyak terjadi perbedaan kepentingan politik di dalam organisasinya. Untuk bergabung menjadi anggota Masyumi digunakan dualisme keanggotaan yang menjadi pilihan (Latifah, 2013). Di satu sisi terdapat keuntungan yakni berkembangnya keanggotaan Masyumi. Namun hal tersebut menjadi masalah yang tertanam dalam tubuh Masyumi, karena lebih besarnya semangat golongan dari pada semangat persatuan (mementingkan kepentingan pribadi). Hingga akhirnya beberapa organisasi Islam yang tergabung dalam Masyumi memutuskan untuk keluar seperti halnya NU dan PSII.

Keadaan dan alasan lainnya menyebabkan Nahdlatul Ulama keluar dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam berbagai aktivitas politik. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama yang sebagai organisasi masyarakat mulai berpikir untuk mengubah visi perjuangannya menjadi partai politik. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dengan sistem multi partai. Nahdlatul Ulama sendiri sejak tahun 1952 memutuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Setelah berubah menjadi partai politik, Nahdlatul Ulama menoreh sejarah yang gemilang yaitu hasil pemilihan umum tahun 1955. Nahdlatul Ulama berhasil memperoleh jatah 45 kursi di Parlemen. Keberhasilan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan umum tahun 1955 disebabkan oleh beberapa tokohnya yang memberikan sumbangsih besar dalam dunia politik di Indonesia (Mundlir & Alrianingrum, 2014).

Penelitian mengenai kajian ini telah dilakukan seperti, penelitian oleh Idham Anwar (2020) yang berjudul "Tulang Punggung Dipungungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955". Penelitian tersebut berisi mengenai lahirnya politik Islam dan perkembangan NU sebagai partai politik. Penelitian kedua oleh Ely Rahma Wati tahun 2018 dalam skripsinya "Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971". Berisi mengenai Nahdlatul Ulama dalam menjadi partai politik, usaha K.H. Abdul Wahab Chasbullah membawa NU sebagai partai politik, dan perjuangannya dalam partai politik pada tahun 1952-1971. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Insan Fahmi Siregar & Mawasdi Rauf (2003) dengan judul "Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960". Penelitian di atas berisi mengenai

awal pembentukan hingga berakhirnya Masyumi. Dari kebanyakan penelitian yang dilakukan tidak banyak yang membahas mengenai dampak keluarnya NU dari Masyumi, oleh karena itu peneliti memutuskan untuk membahas hal tersebut.

Alasan memilih judul dampak keluarnya NU dari Masyumi terhadap pengaruh politik di Indonesia pada tahun 1952-1960 karena keberhasilan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang ketika merubah visi misi organisasi menjadi partai politik Nahdlatul Ulama tetap mendapatkan dukungan dari basis tradisionalnya. Pengkajian artikel ini berkaitan dengan adanya masalah dalam tubuh organisasi Masyumi hingga menyebabkan keluarnya NU dari keanggotaannya. Politik Indonesia yang terus bergulir dapat memberikan dampak tersendiri atas permasalahan diatas. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, peranan Nahdlatul Ulama sebagai anggota Masyumi juga menjadi pendukung dalam pengkajian. Sehingga penulisan artikel ini mampu mengkaji mulai dari peranan Nahdlatul Ulama dari masyumi hingga dampak keluarnya Nahdlatul Ulama terhadap politik di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah. Mulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan kualitatif (Kuntowijoyo, 2004). Kegiatan heuristik melalui pencarian rujukan atau kajian pustaka yang akan digunakan. Rujukan yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memeriksa kebenaran, hal tersebut termasuk tahapan verifikasi. Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data dan sumber data yang ditemukan sehingga dapat merekonstruksi peristiwa sejarah. Tahapan terakhir, historiografi yang menggabungkan atau menuliskan hasil penelitian dengan berisi fakta-fakta sejarah yang didapatkan sehingga menghasilkan suatu karya tulis ilmiah. Penyusunan dan penulisan hasil penelitian mengenai peranan Nahdlatul Ulama dalam Masyumi, sebab keluarnya Nahdlatul Ulama pada tahun 1952, dan dampak keluarnya Nahdlatul Ulama terhadap politik di Indonesia.

Selain itu, pencarian sumber data dan data dilakukan melalui kajian pustaka atau studi pustaka. Metode kajian pustaka sendiri memanfaatkan rujukan terkait kajian yang dibahas dalam penulisan. Menurut Machmud (2016) kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan guna meninjau dan mengkaji lebih dalam berbagai rujukan yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain mengenai topik atau fokus kajian yang akan diteliti. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam penggunaan metode kajian pustaka menggunakan sumber rujukan dengan menelaah sumber rujukan berupa teks keputusan Mukhtar NU ke-19, buku, tugas akhir atau skripsi, dan jurnal yang memiliki kaitan terhadap masalah yang akan dipecahkan (Setyosari, 2016; Nazir, 1998). Pemaparan fakta-fakta sejarah dan akhirnya menghasilkan kesimpulan didapatkan melalui metode sejarah dan kajian pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Peranan NU dalam Masyumi

Nahdlatul Ulama atau biasa disebut NU merupakan sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang keagamaan atau *Jam'iyah* dan merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Lahirnya organisasi NU di dasarkan oleh dua faktor penting yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesian, dimana dalam organisasi ini para ulama menjunjung serta memperjuangkan pemahaman serta

pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, NU mulai ikut berperan dalam dunia politik dengan aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada 1937. Tetapi perjalanan dalam MIAI tidaklah lama, pada oktober 1943 MIAI membubarkan diri dan berganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada awalnya Masyumi sendiri bukan merupakan organisasi politik, tetapi pasca Indonesia merdeka Masyumi merubah visi perjuangan menjadi partai politik dan bekerjasama dengan NU serta organisasi Islam lainnya (Mundlir & Alrianingrum, 2014).

Masyumi pada kurun tahun 1940-1950 akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dimana NU pada saat itu menjadi salah satu anggota istimewa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi pimpinan tertinggi (Majlis Syuro) adalah tokoh NU yakni K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahid Hasyim menjadi wakilnya. Majlis Syuro sendiri memiliki peranan penting yang dapat menentukan kehidupan partai, sehingga dengan kedudukan tersebut membuat NU merasa cukup puas walaupun pimpinan partai diisi oleh kelompok pembaharu yang dominan kaum intelektual (Khairul, 1985). Dalam perkembangannya NU merasa bahwa peran ulama mulai dipinggirkan, hal tersebut dikarenakan pemimpin NU sering melontarkan kritik-kritik terhadap garis politik yang diambil oleh pemimpin Masyumi (Mukminin & Sumarno, 2015).

Pada akhirnya dalam tubuh dewan pimpinan pusat Masyumi muncul sebuah aliran pemikiran untuk menyingkirkan ulama dalam dunia perpolitikan. Menurut Mukminin & Sumarno (2015) pemikiran tersebut muncul dari kalangan kaum intelektual yang mengenyam pendidikan barat. Sehingga kaum intelektual ini berupaya memperkuat kedudukan dan mendesak kedudukan ulama serta kiai yang berada dalam tubuh dewan partai Masyumi. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara dalam sebuah kongres partai memutuskan merubah nama Masyumi menjadi "Partai Politik Islam Masyumi". Jalan pikiran tersebut ditentang oleh pemimpin Nahdlatul Ulama, hal tersebut dikarenakan menurut Nahdlatul Ulama keputusan perubahan nama adalah upaya menyesatkan dan mengandung maksud jahat terhadap ulama dan kiai. Selain itu pemikiran kaum intelektual tersebut dianggap akan merugikan posisi Nahdlatul Ulama yang merupakan himpunan para ulama (Mukminin & Sumarno, 2015).

Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan NU mempunyai peran cukup vital dikarenakan tokoh Nahdlatul Ulama lah yang menjadi salah satu pioneer pendiri organisasi cikal bakal Masyumi. Selain itu dalam perjalanan Masyumi, tokoh-tokoh dalam NU sering menjadi kontrol dengan menyampaikan kritik terhadap tokoh intelek dalam Masyumi guna tetap menjaga posisi ulama dan kiai. Seperti yang kita ketahui bahwasannya peranan kiai dalam Nadlatul Ulama memiliki peran esensial dan pengaruh kultural dalam masyarakat (Farhanuddin, 2017).

Sebab Keluarnya NU dari Masyumi Tahun 1952

Masyumi menjadi salah satu partai yang didirikan pada awal kemerdekaan Indonesia. Awal perumusan pembentukan partai politik Islam dimulai dari rapat di Yogyakarta yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar Islam seperti K.H. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Moh. Roem, dll pada bulan Oktober 1945 (Siregar, 2013). Kemudian setelah keluarnya maklumat pemerintah yang didalamnya terdapat anjuran untuk mendirikan partai politik, para tokoh Islam melakukan muktamar.

Hasil dari muktamar tersebut menjadikan Masyumi menjadi satu-satunya partai politik Islam yang ada di Indonesia.

Sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, terdapat berbagai macam organisasi Islam yang menjadi unsur pendukung di dalamnya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, PUSA, dan Sarekat Islam (Argi & Ikhsanto, 2017). Organisasi Islam yang tergabung dalam Masyumi tentu memiliki peran penting bagi Masyumi. Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang memiliki peran penting dengan pengaruh besar didalamnya. Banyak tokoh-tokoh dengan andil dan kecakapan yang sangat baik seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahid Hasyim. Keduanya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi pimpinan tertinggi Majelis Syuro di Masyumi. Majelis Syuro memiliki kedudukan yang penting dalam berjalannya keberlangsungan Masyumi (Fealy, 2012). Dengan demikian, NU cukup puas dengan kedudukan yang dimiliki dalam Masyumi.

Seiring berjalannya eksistensi Masyumi menjadi organisasi politik Islam di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat masalah-masalah yang timbul menyelimutinya, karena memang Masyumi sendiri terdiri dari gabungan organisasi-organisasi Islam. Masalah-Masalah yang berkembang membuat keluarnya keanggotaan dari tubuh Masyumi. Seperti halnya keanggotaan Nahdlatul Ulama yang memutuskan keluar pada tahun 1952. Penyebab keluarnya keanggotaan NU dari Masyumi sangat kompleks, diantaranya sebagai berikut.

1. Pengesampingan Pendapat dan Kritikan dari NU

Berjalannya waktu pimpinan Masyumi selalu mengesampingkan pendapat dan kritikan yang disampaikan oleh NU. Bahkan banyak pimpinan Masyumi yang memiliki pandangan untuk memisahkan urusan politik dengan urusan ulama yang notabene para ulama merupakan dari golongan NU (Mukminin & Sumarno, 2015). Pandangan para pemimpin Masyumi yang mengesampingkan Majelis Syuro dan respon yang kurang baik terhadap para ulama menjadi kesalahan besar yang diambil oleh Masyumi. Pengesampingan Majelis Syuro karena adanya perubahan AD/ART pada Muktamar IV Masyumi tanggal 15-19 Desember 1949 yang membatasi peran politik ulama dalam memberikan fatwa (Anwar, 2020). Struktur organisasi Masyumi pun berubah dan menjadikan Majelis Syuro sebagai badan penasehat dalam politik. Dan respon kurang baik yang diperlihatkan Masyumi kepada para lulusan pesantren dan pimpinan Nahdlatul Ulama (Mundlir & Alrianingrum, 2014).

2. Tidak Adilnya Pembagian Kursi Kabinet Masyumi

Pandangan tersebut yang menjadi salah satu faktor hengkangnya NU dari Masyumi bahkan ada beberapa ulasan yang berpendapat bahwa keluarnya NU dari Masyumi karena NU tidak mendapat kursi yang adil pada kabinet yang didirikan oleh Masyumi (Anwar, 2020). Masyumi sendiri memiliki 5 jatah dalam kabinet tersebut. Nahdlatul Ulama sendiri biasanya mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai menteri agama. Namun pada tahun tersebut tidak satupun kedudukan kabinet diserahkan kepada NU.

3. Sentimen antara Islam Tradisional dan Islam Modern

Perpecahan di dalam Masyumi yang terlihat paling kompleks adalah sentimen antara Islam Tradisional dan Islam Modern. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi

Islam Tradisional terbesar yang ada di Masyumi dan organisasi Islam Tradisional lainnya seperti *Al-jami'ah al-washliyah*, *Nahdatul wathan*, *Mathla'ul Anwar* merupakan organisasi yang berlingkup lokal. Sedangkan kebanyakan pimpinan Masyumi memiliki pandangan Islam Modernis seperti *Muhammadiyah*, PERSIS, *Al-irsyad* (Fealy, 2012). Perpecahan tersebut tidak hanya meliputi permasalahan politik saja melainkan memasuki ranah antar kultural, generasi dan ideologi. Perpecahan ini pun berlanjut antara kelompok Natsir dan kelompok Sukiman. Sehingga, pada saat dikeluarkannya Mukhtar NU yang ke-19 yang berlangsung di Palembang tahun 1952 terdapat pernyataan yang memuat bahwa NU menyatakan pemisahan diri dari Masyumi dan menyatakan berdiri sendiri sebagai partai politik yang bernama PBNU.

Penyebab dan alasan di atas lah yang menyebabkan Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya dua pemahaman generasi yang berbeda antara kultural dan ideologis. Perpecahan ini menjadi awal mula terciptanya politik dualisme Islam. Bahkan adanya anggapan bahwa NU masuk ke dalam Masyumi adalah dalam rangka untuk *amar ma'ruf nahi munkar* yang hanya bisa dilakukan jika berada di dalamnya tidak bisa dilakukan dari luar (Fadli, 2020). Hal ini juga menjadi salah satu faktor kecil keluarnya NU dari Masyumi. Keluarnya NU dari Masyumi menjadi suatu hal yang tidak diduga, pasalnya NU menjadi tulang punggung bagi organisasi Masyumi dengan jumlah anggota yang sangat banyak (Anwar, 2020). Dengan banyaknya organisasi Islam yang keluar dari Masyumi menjadikan peran politik Islam semakin redup. Hal ini ditandai dengan adanya perlawanan Masyumi terhadap demokrasi terpimpin sebagai awal redupnya peran politik Islam di Indonesia (Bathoro, 2018).

Pernyataan NU keluar dari Masyumi menjadi perbincangan yang besar dalam politik Islam Indonesia pada awal tahun 1950-an. Masyumi yang seharusnya menjadi partai politik Islam di Indonesia didirikan sebagai penyatu aspirasi organisasi Islam di Indonesia mengalami perpecahan dan perdebatan di dalam tubuh partai ini. NU bukanlah organisasi pertama yang keluar dari Masyumi, terdapat beberapa organisasi yang keluar dari Masyumi sebelumnya seperti PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada tahun 1947. Menurut Teks Putusan Mukhtar NU ke-19 dalam Wati (2018) yang berisi tiga pokok yakni, keputusan tersebut tidaklah menimbulkan kekacauan pada umat Islam Indonesia, keputusan didasarkan atas perundingan dengan Masyumi, dan membentuk dewan pimpinan umat Islam Indonesia untuk berkumpul dan berjuang bersama-sama. Dengan keluarnya NU dan berbagai organisasi dari tubuh Masyumi tentu memiliki dampak yang serius bagi keberlangsungan Masyumi sebagai partai politik di Indonesia.

Dampak NU Keluar dari Masyumi terhadap Politik Indonesia

Masyumi merupakan sebuah partai politik dengan berideologi Islam yang terdiri atas gabungan beberapa organisasi Islam lainnya. Sejak berdiri, Masyumi sendiri berkembang begitu pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai bertambahnya jumlah keanggotaan Masyumi yang berasal dari organisasi-organisasi Islam bersifat lokal. Organisasi besar Islam yang bergabung dalam Masyumi seperti NU dan Muhammadiyah. Berbagai cara dilakukan Masyumi untuk menambah jumlah keanggotaannya.

Dalam perkembangannya, NU yang menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi memutuskan untuk keluar sesuai dengan keputusan Mukhtar NU ke-19

di Palembang. Tahun 1952 NU keluar dan tidak lagi menjadi anggota istimewa dari Masyumi. Keputusan NU keluar dalam keanggotaan Masyumi dengan alasan dan masalah yang menyelimutinya. Keputusan tersebut diambil dari perbandingan suara terbanyak sebanyak 61 anggota setuju, 9 menolak, dan 7 abstain. Poin penting dalam putusan Mukhtamar NU ke-19 berisi menyetujui putusan PBNU untuk memisahkan diri dari Masyumi, dan menyarankan Masyumi untuk berubah menjadi badan federatif, serta menyetujui garis besar yang dimajukan PBNU (Anwar, 2020).

Sebenarnya perbincangan mengenai keluarnya Nahdlatul Ulama telah dibahas pada mukhtamar sebelumnya. Namun memang keputusan mengenai hal tersebut baru disahkan pada Mukhtamar NU ke-19 dengan kepemimpinan dari K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Keluarnya NU dari Masyumi menjadikan NU sebagai partai politik baru untuk lebih mengatur partainya sendiri (Mundlir & Alrianingrum, 2014). Nahdlatul Ulama mulai membahas mengenai perubahan struktur, persoalan penyatuan dan eksistensi partai, serta partisipasi NU dalam kabinet. Berubahnya Nahdlatul Ulama menjadi sebuah partai politik, tidak terlepas dari campur tangan K.H. Abdul Wahab Chasbullah sebagai pimpinan dalam mengondisikannya (Wati, 2018). Penyusunan program-program perjuangan, menambah keanggotaan, hingga pendanaan. Keikutsertaan NU dalam pemilu tahun 1955 menjadi langkah awal sebagai partai politik.

Tak hanya berhenti dalam hal tersebut, K.H. Abdul Wahab Chasbullah juga memperjuangkan suara Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan serta keikutsertaannya dalam kabinet. Nahdlatul Ulama yang awalnya memiliki konsentrasi dalam bidang sosial dan keagamaan (*Jam'iyah*), kini berubah menjadi partai politik yang juga tertuang dalam AD/ART Nahdlatul Ulama (Subagio & Sumarno, 2019). Akhirnya NU berhasil menduduki peringkat ketiga yang memperoleh suara terbanyak. Dengan posisi Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Ulama, santri, dan politisi menjadi kekuatan besar yang dapat membuat Nahdlatul Ulama berhasil menjadi salah satu dari empat partai terbesar dalam pemilu 1955.

Pasca pemilu 1955, majelis konstituante berkumpul untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan masalah Dasar Negara. Masyumi, NU, PSII, Perti, dan PPTI sebagai partai berideologi Islam tentunya juga menginginkan Islam sebagai Dasar Negara (Nurdamarsah, 2018). Pertentangan dari golongan nasionalis timbul atas keinginan partai-partai Islam tersebut. Munculnya konsepsi Soekarno yang berkeinginan untuk menggabungkan dan melibatkan PKI dalam kabinet (Sumanto & Zulkarnain, 2016). Masyumi menolak dan memutuskan untuk keluar dari kabinet dan konsepsi Soekarno terus bergulir. Dengan hal tersebut, dilakukan pembentukan Kabinet Djuanda atau Zaken Kabinet yang dipilih berdasarkan keahlian untuk menggantikan kabinet sebelumnya. Masyumi menilai bahwa pembentukan kabinet tersebut dilakukan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan UUD yang berlaku (Siregar, 2008).

Posisi Masyumi semakin terpuruk membuat Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara memproklamkan pemberontakan PRRI. Tuduhan ditujukan kepada Masyumi terhadap terjadinya pemberontakan PRRI karena adanya keterlibatan beberapa tokoh didalamnya. Ditambah Peperpu/ KSAD No. Prt/ Peperpu/ 028/ 1958 tanggal 5 September 1958 mengenai larangan Partai Masyumi, Parkindo, PSI dan IPKI di daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dengan kondisi Indonesia yang tidak stabil, membuat

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan memusatkan kekuasaan pada presiden, penyederhanaan partai, dan berlakunya UUD 1945.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden, membuat Soekarno membentuk DPR-GR. Tetapi wakil Islam dalam parlemen (DPR-GR) akan dikurangi tidak seperti sebelumnya. Jumlah wakil Islam yang awalnya 115 orang menjadi 43 orang (36 NU, 5 PSII, dan 2 Perti) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 383 orang, terdiri dari wakil kelompok Islam, nasionalis, dan lainnya (Mukminin & Sumarno, 2015). Konflik antara pemimpin Masyumi dengan Soekarno serta dikeluarkannya Dekrit Presiden menyebabkan anggota istimewa Masyumi khawatir. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak langsung bagi anggota istimewa. Penghapusan anggota istimewa dalam struktur organisasi Masyumi akhirnya menjadi jalan yang ditempuh Masyumi. Keputusan yang diambil Masyumi dalam penghapusan anggota istimewa berdampak pada semakin berkurangnya keanggotaan Masyumi (Siregar, 2013).

Eksistensi Masyumi dalam politik Indonesia semakin terperosok. Apalagi setelah Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 (Syaekhu, 2021). Peraturan itu sendiri berisi mengenai pengawasan, pengakuan, dan pembubaran partai-partai politik. Dilarang beroperasinya Partai Masyumi di berbagai daerah diakibatkan dari adanya konflik antara pemimpin Masyumi dengan Soekarno, serta terjadinya pemberontakan PRRI. Hal tersebut tak membuat Masyumi hanya diam. Pembahasan politik dengan melobi pemerintah dan membawa masalah tuduhan pelibatan PRRI dalam pengadilan menjadi strategi Masyumi dalam mempertahankan partainya. Perjuangan Masyumi dalam mempertahankan partai akhirnya gagal. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1960, Soekarno resmi mengeluarkan Kepres Nomor 200 Tahun 1960 dengan memberikan waktu kepada Masyumi selama 30 hari untuk melakukan pembubaran (Sumanto & Zulkarnain, 2016). Masyumi akhirnya memutuskan untuk bubar, karena walaupun Masyumi dijalankan akan menjadi partai yang dilarang oleh negara.

Dinamika partai politik Nahdlatul Ulama terus berkembang setelah dibubarkannya Masyumi. Dibeberapa kota misalnya, seperti halnya Semarang, Nahdlatul Ulama menjadi salah satu partai politik yang menduduki pemilu pada tahun 1952 hingga 1971 (Sayuti, dkk., 2018). Perkembangannya ini juga diiringi dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi terhadap negara. Peranan Nahdlatul Ulama dalam menyikapi pemberontakan PKI dilakukan dengan bekerjasama oleh TNI. Menurut Cribb (1990) dalam Sayuti, dkk. (2018) penumpasan PKI di Semarang, dilalui dengan pawai, kampanye, dan NU melalui GP Ansor bersama Kodam VII/ Diponegoro ikut dalam menumpas pemberontakan PKI yang terjadi.

Kesimpulan

Masyumi merupakan partai yang paling luas pengaruhnya di seluruh Indonesia dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Karena Masyumi sendiri lebih mengedepankan unsur egalitarian dalam penerimaan anggotanya dan didukung oleh tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh di masyarakat. Yang menyebabkannya menjadi anggota istimewa Partai Masyumi dengan menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari menjadi pimpinan tertinggi di Masyumi. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara Partai Masyumi dengan organisasi NU. Permasalahan tersebut timbul ketika NU merasa bahwa peran ulama

mulai di belakangkan, hal ini disebabkan pemimpin NU sering melontarkan kritik-kritik terhadap garis politik yang diambil oleh pemimpin Masyumi.

Dari permasalahan di atas, mulai muncul perpecahan yang cukup kompleks. Dimulai dari adanya perbedaan pandangan antara Islam Tradisional dan Islam Modern. Disatu sisi NU sebagai organisasi Islam Tradisional memiliki ruang lingkup yang melokal. Disisi lain mayoritas pimpinan dari Masyumi lebih bernuansa pada Islam Modern. Tentunya sentimen tersebut merupakan hal yang cukup krusial. Adanya perpecahan antara Masyumi dengan NU hingga keluarnya NU dari Masyumi juga berdampak pada perpolitikan yang ada di Indonesia. Keberadaan partai Masyumi dalam politik Indonesia semakin mengalami kemunduran. Partai Masyumi dilarang beroperasi di berbagai daerah dikarenakan adanya konflik antara pemimpin Masyumi dengan Soekarno, serta terjadinya pemberontakan PRRI. Pada akhirnya, Masyumi sebagai partai politik dilarang oleh pemerintah Indonesia sehingga mulai dari itu Masyumi mengambil keputusan untuk keluar dari panggung politik.

Dilarangnya Masyumi, tidak membuat eksistensi NU sebagai partai politik baru menghilang. Nahdlatul Ulama terus bergulir dalam perpolitikan hingga menjadi salah satu partai terbesar dalam pemilu 1955. Namun memang, setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden membuat kekuasaan berada langsung di tangan presiden. Dampak dalam konstituante yang ditimbulkan dalam dikeluarkannya Dekrit Presiden, dengan adanya pembentukan DPR-GR yang membatasi wakil kelompok Islam didalamnya. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia turut membuat Nahdlatul Ulama turut membantu memberantasnya. Peranan Nahdlatul Ulama dalam bekerjasama dengan TNI untuk menumpas pemberontakan PKI.

Referensi

- Anwar, I. (2020). Tulang Punggung Dipunggung: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955. *Al-Qalam*, 26(2), 353–368. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v26i2.888>.
- Argi, P., & Ikhsanto, M. A. (2017). *Peran Nahdlatul Ulama Di Partai Masyumi Pada Tahun 1945-1952* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/110312>
- Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 24-41. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/757>
- Fadli, M. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7927>
- Farhanuddin, M. (2017). Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Di Kabupaten Majene. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), <https://doi.org/10.24252/profetik.v5i2a1>.
- Fealy, G. (2012). *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967*. LKIS Pelangi Aksara.
- Khairul, A. (1985). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. PT Duta Aksara Mulia.
- Kuntowijoyo. (2004). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Latifah, Z. (2013). Peran Politik Umat Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia (Studi Kasus Partai Masyumi 1945). In I. Burdah (Ed.), *Merangkai Ilmu-Ilmu Keadaban*

- Penghormatan Purna Tugas Ustaz/Muhammad Muqoddas*. Penerbit Beranda.
- Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Penerbit Selaras.
- Makhmudah, S. (2015). Dinamika Dan Tantangan Masyarakat Islam Di Era Modernisasi (Pemikiran dan Kontribusi Menuju Masyarakat Madani). *Jurnal LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, 3(2), 93–109. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/lentera/article/view/1321>.
- Mukminin, M. A., & Sumarno. (2015). Hubungan NU Dan Masyumi (1945-1960) Konflik Dan Keluarnya NU Dari Masyumi. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah EJurnal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 487–494. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12808>.
- Mundlir, A., & Alrianingrum, S. (2014). Peran Politik NU Tahun 1952-1955. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 628–636.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurdamarsah, T. (2018). Politik Masyumi Di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. *HERODOTUS: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(01), 21–28. <http://dx.doi.org/10.30998/herodotus.v1i1.2874>.
- Sayuti, A., Wasino, & Sodik, I. (2018). Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama Di Semarang Tahun 1952-1979. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 1–11. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/25369>.
- Setyosari, H. . (2016). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Prenada Media.
- Siregar, I. F. (2008). Pasang Surut Peran Politik Masyumi Dalam Pemerintahan (1945-1960). *Forum Ilmu Sosial*, 35(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/1298/1358>.
- Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 14(1), 88–103. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/614>.
- Siregar, I. F., & Rauf, M. (2003). *Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960* [Universitas Indonesia].
- Subagtio, M. E., & Sumarno. (2019). Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan. *Avatara*, 7(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/28719>.
- Sumanto, A., & Zulkarnain. (2016). Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955. *Risalah*, 1(3).
- Syaekhu, A. (2021). *Prawoto Mangkusasmito Dan Bubarnya Partai Masyumi* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon]. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5634/>.
- Wati, E. R. (2018). *Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah Dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971* [Universitas Negeri Jember]. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86985>.